



KEHATI

# DINAMIKA SOSIAL

*Buku ke-3 Pembelajaran Implementasi Program:*

**Pengembangan Inisiatif Pendanaan Imbal Jasa Ekosistem dalam Mendukung Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa di Kapuas Hulu Kalimantan Barat**

*Berdasarkan Pelaksanaan Program Konservasi di Hutan Desa Nanga Betung, Desa Nanga Jemah, Desa Sri Wangi dan Desa Tanjung, Periode April 2021 - Maret 2024*

# DINAMIKA SOSIAL

*Buku ke-3 Pembelajaran Implementasi Program*

Pengembangan Inisiatif Pendanaan Imbal Jasa Ekosistem dalam  
Mendukung Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat bersama  
Lembaga Pengelola Hutan Desa di Kapuas Hulu Kalimantan Barat

*Berdasarkan Pelaksanaan Program Konservasi  
di Hutan Desa Nanga Betung, Desa Nanga Jemah,  
Desa Sri Wangi dan Desa Tanjung,  
Periode April 2021 - Maret 2024*

***Ditulis oleh:***

*Abroorza A. Yusra, S.S.*

*Adilah Dinilhuda, S.T.*

*Yulita Maulidia Ningsih, S.T.*



## DINAMIKA SOSIAL Copyright © 2024

*Buku ke-3 Pembelajaran Implementasi Program*

Pengembangan Inisiatif Pendanaan Imbal Jasa Ekosistem dalam Mendukung Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa di Kapuas Hulu Kalimantan Barat

*Berdasarkan Pelaksanaan Program Konservasi di Hutan Desa Nanga Betung, Desa Nanga Jemah, Desa Sri Wangi dan Desa Tanjung, Periode April 2021 – Maret 2024*

### Pimpinan Produksi

Imanul Huda, S.Hut, M.Hut.

### Penulis

Abroorza A. Yusra, S.S.

Adilah Dinilhuda, S.T.

Yulita Maulidia Ningsih, S.T.

### Fotografer

Abroorza A. Yusra, S.S.

Andika Purnama

Zulkifli Hz

Victor Fidelis Sentosa

Scott Nishiki

Sy. Y. Hadinata

Dokumen YPRCFI

### Editor Konten

Imanul Huda, S.Hut, M.Hut.

Ir. Ali Hayat

### Editor Bahasa

Abroorza A. Yusra, S.S.

Adilah Dinilhuda, S.T.

### Pendukung Data

Adilah Dinilhuda, S.T.

Ir. Ali Hayat

Yadi Purwanto, S.Hut.

Sy. Y. Hadinata, S.Ap.

Ir. Iwan Supardi

Masudi, S.E.

### Desain Layout

Abroorza A. Yusra, S.S.

### Diterbitkan pertama kali oleh

Yayasan KEHATI. Jl. Benda Alam I No.73,

Cilandak Timur, Pasar Minggu- Jakarta Selatan.

Tel. (+62-21) 7834-2866

Fax. (+62-21) 7834-2214

Email: [kehati@kehati.or.id](mailto:kehati@kehati.or.id)

**Cetakan Pertama, Juni 2024**

**vii + 25 halaman, 17,6 x 25 cm**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.



# DAFTAR ISI

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR DIREKTUR PROGRAM TFCA KALIMANTAN</b>                   | <b>iv</b> |
| <b>KATA PENGANTAR DIREKTUR YAYASAN PRCF INDONESIA</b>                    | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b>                                           | <b>vi</b> |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                                               | <b>01</b> |
| <b>I. MENYELARASKAN ANTARA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN ALAM</b> | <b>03</b> |
| 1.1. Mencegah Relasi Eksploitatif                                        | 03        |
| 1.2. Analisis Pohon Masalah dan Pohon Solusi                             | 07        |
| <b>II. ANCAMAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN HUTAN DESA</b>                   | <b>09</b> |
| 2.1. Ancaman                                                             | 09        |
| 2.1.1. <i>Desa Nanga Betung</i>                                          | 10        |
| 2.1.2. <i>Desa Nanga Jemah</i>                                           | 10        |
| 2.1.3. <i>Desa Sri Wangi</i>                                             | 11        |
| 2.1.4. <i>Desa Tanjung</i>                                               | 11        |
| 2.2. Analisis Hambatan                                                   | 12        |
| 2.2.1. <i>Desa Nanga Betung</i>                                          | 13        |
| 2.2.2. <i>Desa Nanga Jemah</i>                                           | 13        |
| 2.2.3. <i>Desa Sri Wangi</i>                                             | 14        |
| 2.2.4. <i>Desa Tanjung</i>                                               | 14        |
| <b>III. PENYADARTAHUAN KONSERVASI HUTAN DESA</b>                         | <b>15</b> |
| 3.1. Sosialisasi dan Penyadartahuan Masyarakat Desa Dampingan            | 15        |
| 3.1.1. <i>Kegiatan Sosialisasi dan Penyadartahuan secara Langsung</i>    | 16        |
| 3.1.2. <i>Sosialisasi dan Penyadartahuan melalui Pemanfaatan Media</i>   | 16        |
| 3.2. Penerapan dan Tingkat Serapan oleh Masyarakat                       | 18        |
| 3.3. Rencana Tindak Lanjut                                               | 19        |
| <b>IV. SISI PEMBELAJARAN DALAM SOSIALISASI DAN PENYADARTAHUAN</b>        | <b>21</b> |
| <b>V. KESADARTAHUAN ADALAH KUNCI</b>                                     | <b>23</b> |



# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR PROGRAM TFCA KALIMANTAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat turut serta mendukung program Imbal Jasa Ekosistem yang dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini merupakan bagian dari komitmen kami, TFCA Kalimantan, untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Kami merasa bangga dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian Hutan Desa melalui berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Yayasan PRCF Indonesia. Kegiatan Imbal Jasa Ekosistem yang meliputi pengembangan kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), perlindungan kawasan Hutan Desa melalui patroli hutan dan pendataan, serta penyadartahuan masyarakat, merupakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengembangan kelembagaan LPHD adalah fondasi penting dalam pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan. Dengan kapasitas yang diperkuat, LPHD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan hutan dengan lebih efektif dan mandiri. Melalui studi dinamika sosial, Yayasan PRCF Indonesia telah melakukan analisa kondisi sosial serta mencari solusi pengelolaan sumber daya alam setempat.

Selain itu, program penyadartahuan masyarakat memainkan peran kunci dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan kampanye, kami berharap masyarakat semakin menyadari nilai ekologis dan ekonomis dari hutan yang sehat dan terawat.

Terima kasih kepada pimpinan Yayasan PRCF Indonesia dan seluruh personilnya. Para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatannya, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, KPH Kapuas Hulu Selatan, Yayasan PRCF Indonesia, LPHD Pundjung Batara, LPHD Nyuai Peningun, LPHD Batang Tau, dan LPHD Bukit Belang; pemerintah desa, tokoh masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat atas kerja sama mereka dalam mewujudkan program ini.

Kami percaya bahwa upaya bersama ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian yang telah diraih dan menjadi inspirasi bagi inisiatif-inisiatif pelestarian hutan lainnya di masa mendatang.

*Salam Hormat,*  
**Ir. Puspa Dewi Liman, M.Sc**  
**Direktur Program TFCA Kalimantan,**  
**Yayasan Kehati**

# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR YAYASAN PRCF INDONESIA

Kepada Para Pembaca yang Terhormat.  
Salam Lestari dari Yayasan PRCF Indonesia!

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala dan dedikasi yang tinggi, akhirnya kami dapat menyelesaikan program Imbal Jasa Ekosistem yang telah dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode, periode April 2021 - Maret 2024.

Program Imbal Jasa Ekosistem ini bertujuan untuk mendukung pelestarian ekosistem Hutan Desa oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan. Cakupannya meliputi pengembangan kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), perlindungan kawasan Hutan Desa melalui patrol, pendataan, dan penyadartahuan masyarakat, serta pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.

Selama pelaksanaan program ini, kami telah mengumpulkan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Pengalaman tersebut kami tuangkan ke dalam tiga buku yang masing-masing bertema tentang *Imbal Jasa Ekosistem*, *Keanekaragaman Hayati*, dan *Dinamika Sosial*. Buku-buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan di masa mendatang.

Buku pertama, yang bertema Imbal Jasa Ekosistem, berisi tentang konsep dan implementasi imbal jasa ekosistem di empat desa dan menjelaskan bagaimana masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan melalui mekanisme imbal jasa ekosistem, sekaligus menjaga kelestarian hutan tersebut.

Buku kedua, dengan tema Keanekaragaman Hayati, mengulas kekayaan flora dan fauna yang terdapat di kawasan Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Buku ini memaparkan hasil-hasil pendataan dan langkah-langkah perlindungannya. Kemudian, buku ketiga, bertema Dinamika Sosial, menceritakan dinamika masyarakat penerima manfaat program dan bagaimana program berupaya melakukan beberapa pendekatan untuk membangun kesadartahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kawasan Hutan Desa dan meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan hutan yang lestari.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Kehati dan TFCA Kalimantan yang telah memberikan dukungan finansial dan moral agar terlaksananya program ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Kecamatan, Pemerintah Desa penerima manfaat program, LPHD-LPHD mitra kerja, para tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat di empat desa yang telah berperan serta aktif dalam setiap kegiatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi inspirasi dan dasar bagi inisiatif pelestarian Hutan Desa lainnya di masa mendatang. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

*Salam Hormat,*  
**Imanul Huda, S.Hut., M.Hut.**  
**Direktur Yayasan PRCF Indonesia**

# DAFTAR GAMBAR & TABEL

|           |                                                                                                               |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. | Analisis Pohon Masalah                                                                                        | 07 |
| Gambar 2. | Analisis Pohon Solusi                                                                                         | 08 |
| Gambar 3. | Tipe Hambatan dalam Pencegahan Deforestasi dan Degradasi                                                      | 12 |
| Gambar 4. | Pokok-Pokok Strategi Komunikasi dan Penyadartahuan terkait Konservasi Hutan Desa                              | 15 |
| Gambar 5. | Elemen Komunikasi dan Faktor Lainnya yang menjadi Pertimbangan Penentuan Media Sosialisasi dan Penyadartahuan | 16 |
| Gambar 6. | Ruang Lingkup Aktivitas yang Berpotensi menjadi Rencana Tindak Lanjut Sosialisasi dan Penyadartahuan          | 20 |
| Gambar 7. | Tipe Pendekatan dalam Sosialisasi dan Penyadartahuan Masyarakat terkait Konservasi Hutan Desa                 | 22 |
| <hr/>     |                                                                                                               |    |
| Tabel 1.  | Indikator Tingkat Ancaman Akibat Deforestasi dan Degradasi                                                    | 09 |
| Tabel 2.  | Elemen Komunikasi yang menjadi Pertimbangan Penentuan Media Sosialisasi dan Penyadartahuan                    | 17 |







# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

## Tentang Yayasan PRCF Indonesia

Yayasan PRCF Indonesia telah terdaftar sebagai lembaga yang berbadan hukum Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2000. Dalam upaya mendorong profesionalisme pengelolaan organisasi, PRCF Indonesia beralih bentuk organisasi menjadi Yayasan PRCF Indonesia mulai pada tanggal 22 November 2002. Kemudian, ditetapkan perubahan nama atas pembentukan lembaga menjadi "Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia" pada 14 Mei 2018.

Tujuan Yayasan PRCF Indonesia adalah, "memperkuat partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap sumber daya alam, dan pengembangan sosial ekonomi serta revitalisasi budaya yang berdampak kepada masyarakat".

Yayasan PRCF Indonesia lahir dari upaya untuk mempertegas eksistensi dari sebagian orang yang memiliki kepedulian dan ingin berperan aktif dalam; (1) Mencari solusi dan berkontribusi dengan beberapa alternatif terhadap upaya konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan, (2) Melakukan proses peningkatan kesadaran kritis dan mempromosikan kepedulian masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, (3) Menggali dan menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya memperkuat identitas budaya masyarakat, serta (4) Mendorong terlaksananya proses pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat secara mandiri.

Visi Yayasan PRCF Indonesia adalah mewujudkan konservasi keanekaragaman ha-

yati yang mendukung fungsi ekosistem dan menyediakan pemanfaatan sumber daya-secara berkelanjutan, serta mempromosikan kemandirian masyarakat setempat melalui peningkatan sosial ekonomi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Yayasan PRCF Indonesia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan program konservasi alam dan pengembangan masyarakat. Masyarakat diupayakan selalu terlibat dalam berbagai aspek kegiatan dan program yang dilakukan oleh Yayasan PRCF Indonesia, termasuk survei-survei, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

## Tentang Program Imbal Jasa Lingkungan

*Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) Kalimantan membuat proyek hibah dalam suatu program yang tujuannya melindungi keanekaragaman hayati, menjaga karbon hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang selaras dengan perlindungan sumber daya hutan di Kalimantan.

Pada 2019, Yayasan KEHATI sebagai administrator TFCA Kalimantan memulai proses hibah Siklus 5 yang implementasinya dibangun melalui kerjasama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satunya adalah Yayasan PRCF Indonesia sebagai mitra. Program "Pengembangan Inisiatif Pendanaan Imbal Jasa Ekosistem dalam Mendukung Konservasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat" merupakan bagian dari program TFCA Kalimantan Siklus 5 tersebut.

Adapun lokasi dampingan untuk program ini berada di Desa Nanga Betung, Desa Nanga



Jemah, Desa Sri Wangi, Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Implementasi program dilakukan dalam rentang bulan April 2021 - Maret 2024 atau selama 3 (tiga) tahun.

Semua desa dampingan sudah memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Program ini memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Hutan Desa yang telah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hak kelola 35 tahun kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Program ini dapat memfasilitasi LPHD dalam melakukan pengelolaan serta mempersiapkan skema imbal jasa ekosistem (*Payment for Ecosystem Services* - PES) terhadap kegiatan konservasi bagi pengelolaan Hutan Desa dalam jangka panjang.

Tujuan umum proyek ini adalah "Penguatan kelembagaan LPHD Punjung Batara di Desa Nanga Betung, LPHD Nyuai Peningun di Desa Nanga Jemah, LPDH Batang Tau di Desa Sriwangi, dan LPHD Bukit Belang di Desa Tanjung untuk mendapatkan akses pendanaan imbal jasa ekosistem jangka panjang. Secara keseluruhan, khusus tujuan dari proyek ini adalah:

- Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola Hutan Desa.
- LPHD bersama masyarakat dapat melakukan upaya perlindungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola Hutan Desa.
- Kemitraan antara LPHD dengan pihak ketiga terbangun dalam mendukung pengelolaan Hutan Desa melalui pembiayaan jangka panjang.
- Produktivitas usaha masyarakat di empat desa pengelola Hutan Desa meningkat untuk mengurangi ancaman kelestarian hutan.



# I. MENYELARASKAN ANTARA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN ALAM

---

## 1.1. MENCEGAH RELASI EKSPLOITATIF

Hutan Desa merupakan kawasan hutan negara yang pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat desa untuk dikelola secara berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Di Indonesia, konsep Hutan Desa menjadi sangat relevan mengingat banyaknya masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab itu, Pengelolaan Hutan Desa yang baik penting untuk diselenggarakan.

Bisa dianggap bahwa masyarakat yang tinggal di Hutan Desa memiliki keterkaitan erat dengan hutan di sekitarnya. Hutan menyediakan kayu untuk bangunan dan bahan bakar, serta produk non-kayu seperti buah-buahan, getah, dan obat-obatan tradisional. Selain itu, hutan juga menjadi sumber air bersih dan tempat tinggal bagi banyak spesies yang penting untuk keseimbangan ekosistem lokal.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Data Kehutanan Indonesia, 2023), lebih dari 60% penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan di Indonesia bergantung pada hutan untuk kebutuhan pokok mereka. Ini mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta jasa ekosistem seperti penyediaan air dan pengaturan iklim. Keanekaragaman hayati yang tinggi di Hutan Desa juga memberikan sumber pangan dan bahan obat. Tanpa ekosistem yang terjaga, kehidupan masyarakat juga akan terganggu.

Meskipun Hutan Desa memberikan banyak manfaat, kenyataannya beberapa aktivitas masyarakat dapat membahayakan kelestariannya. Penebangan liar, perburuan ilegal, dan pembukaan lahan untuk pertanian tanpa kontrol yang tepat diiringi oleh eksploitasi sumber daya yang berlebihan adalah beberapa contoh aktivitas yang merusak hutan. Menurut laporan dari Forest Watch Indonesia (2022), sekitar 1,3 juta hektar hutan hilang setiap tahun di Indonesia dan sebagian besar kerusakan ini terjadi di hutan-hutan yang berada dekat dengan pemukiman masyarakat.

Dampak dari aktivitas ilegal ini sangat merugikan, baik dari segi ekologi maupun sosial. Hilangnya hutan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas air, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Secara sosial, degradasi hutan juga berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, mengakibatkan penurunan pendapatan dan kualitas hidup.

Tentu untuk mencegah kondisi semakin memburuk atau lebih jauh, merevitalisasi fungsi hutan kembali seperti sedia kala diperlukan solusi yang tepat. Program pendampingan bagi masyarakat Hutan Desa sangat diperlukan guna menjadi solusi.

Salah satu yang dapat Yayasan PRCF Indonesia lakukan adalah menyelenggarakan program Imbal Jasa Ekosistem di empat desa



di Kabupaten Kapuas Hulu. Keempat desa tersebut adalah Desa Nanga Betung, Desa Nanga Jemah, Desa Sri Wangi, dan Desa Tanjung. Program Imbal Jasa Ekosistem tersebut mencakup pengembangan kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pengelolaan Hutan Desa (patroli, pembuatan perdes, pengembangan usaha melalui KUPS), mendukung Program Imbal Jasa Ekosistem jangka panjang dan penyadartahuan masyarakat. Lewat dukungan TFCA Kalimantan Siklus 5, program diselenggarakan dalam jangka waktu 3 tahun (April 2021 – Maret 2024).

Pengembangan kelembagaan LPHD merupakan fondasi penting dalam pengelolaan Hutan Desa. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, LPHD dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola Hutan Desa secara mandiri dan berkelanjutan. LPHD yang mumpuni tentunya lebih mampu menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan hutan dengan lebih efektif, yang pada akhirnya mengurangi risiko kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal.

Menurut laporan Yayasan PRCF Indonesia (2023), pengembangan kelembagaan ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa sebesar 45%. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota LPHD yang aktif serta meningkatnya kualitas pengelolaan Hutan Desa yang lebih terorganisir dan terarah.

Sembari mengembangkan kelembagaan, LPHD juga didorong untuk secara rutin melaksanakan patroli hutan dan pendataan kawasan hutan. Tujuannya adalah melindungi hutan dari aktivitas ilegal serta memahami kondisi hutan secara lebih mendalam. Data yang dikumpulkan dapat menjadi acuan perencanaan langkah-langkah konservasi yang lebih efektif.

Selama patroli, jika menemukan masyarakat yang berburu, menebar perangkap, melaku-

melakukan penebangan atau kegiatan penambangan, tim patroli akan melakukan teguran dan sosialisasi. Artinya, kegiatan patroli tidak berhenti pada tahap mengawasi, namun juga menjadi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat yang masih beraktivitas di dalam kawasan Hutan Desa. Tentu pelarangan harus menyesuaikan dengan regulasi (Permen KLHK Nomor 4 tahun 2023). Kegiatan mengumpulkan hasil hutan bukan kayu, seperti gaharu, buah-buahan, rotan, tetap diperbolehkan.

Selama kurun waktu 2021–2023, patroli hutan yang dilakukan oleh LPHD berhasil mengurangi aktivitas ilegal di kawasan Hutan Desa hingga 30% (Yayasan PRCF Indonesia, 2023). Pendataan keanekaragaman hayati Hutan Desa yang dilakukan secara rutin cukup membantu identifikasi area yang memerlukan intervensi konservasi, memastikan bahwa upaya perlindungan hutan dilakukan secara tepat sasaran.

Di luar kawasan hutan, penyadartahuan masyarakat digalakkan secara intens. Sebab, penyadartahuan tidak hanya diperuntukkan kepada mereka yang kerap melakukan kegiatan di Hutan Desa. Namun juga seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah desa serta kelompok-kelompok masyarakat. Alasannya, mereka memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak dengan perlindungan Hutan Desa.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Edukasi dan kampanye penyadartahuan masyarakat secara menyeluruh juga penting dilakukan agar terbangun tujuan dan pema-

haman yang sama tentang pentingnya menjaga hutan. Berbagai agenda pertemuan, pelatihan, menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar tentang dampak negatif dari aktivitas ilegal dan manfaat dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kesadaran yang meningkat tentu kedepannya dapat mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap hutan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Yayasan PRCF Indonesia (2023), penyadartahuan masyarakat telah meningkatkan pemahaman dan kepedulian lingkungan di empat desa dampingan. Ini tercermin dari berbagai dukungan terhadap program dalam bentuk keterlibatan aktif pemerintah desa dalam kegiatan-kegiatan program, serta adanya pengeluaran regulasi desa sehubungan dengan konservasi Hutan Desa.

Antusias masyarakat untuk terlibat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga tergolong tinggi. KUPS Galon Air Bersih di Desa Tanjung dan Desa Nanga Betung menjadi cukup didukung oleh masyarakat. Selain karena kebutuhan air memang merupakan keperluan dasar semua orang, juga karena mereka memahami bahwa KUPS merupakan upaya membangun keselarasan perlindungan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Program pendampingan ini telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Masyarakat mulai paham pentingnya menjaga hutan dan terlibat secara partisipatif dalam kegiatan konservasi. Mereka juga mulai melihat hutan sebagai aset jangka panjang yang harus dijaga, bukan hanya sumber daya yang bisa dieksploitasi secara instan. Tentu, tidak dipungkiri pula, ada mereka yang kontra terhadap program. Umumnya, mereka belum memahami secara utuh substansi dari program atau hanya mau melihat program dari kaca mata keuntungan jangka pendek. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan.





(Yayasan PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

Karenanya, Yayasan PRCF Indonesia selaku operator program, dan LPHD, berupaya mendorong kesinambungan yang terus menerus dalam upaya konservasi, termasuk di dalamnya penyadartahuan masyarakat di desa maupun masyarakat secara umum.

Setidaknya, lewat Program Imbal Jasa Ekosistem yang telah dijalankan, tampak secara lebih jelas permasalahan dan solusi yang memungkinkan program-program lain bisa dijalankan tanpa harus mengulang lagi dari awal. Secara substansial, arah program yang akan atau sedang dikembangkan oleh Yayasan PRCF Indonesia, tetaplah sama, yakni untuk membangun keharmonisan antara kehidupan manusia dan kelestarian alam.

- Blomley, T., Pflieger, K., Isango, J., Zahabu, E., Ahrends, A., & Burgess, N. (2008). Seeing the wood for the trees: an assessment of the impact of participatory forest management on forest condition in Tanzania. *Oryx*, 42(3), 380-391.
- Forest Watch Indonesia. (2022). State of the Indonesian Forests. Jakarta: FWI.
- FAO. (2016). State of the World's Forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges and opportunities. Rome: FAO.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Data Kehutanan Indonesia. Jakarta: KLHK.
- Larson, A. M., Barry, D., Dahal, G. R., & Colfer, C. J. P. (2010). Forests for People: Community Rights and Forest Tenure Reform. Earthscan.
- Meijaard, E., Sheil, D., Nasi, R., Augeri, D., Rosenbaum, B., Iskandar, D., ... & Stanley, S. A. (2011). The effects of forest certification on biodiversity. *Conservation Biology*, 25(6), 1131-1142.
- Yayasan PRCF Indonesia. (2023). Laporan Program Imbal Jasa Ekosistem 2021-2023. Pontianak: Yayasan PRCF Indonesia.



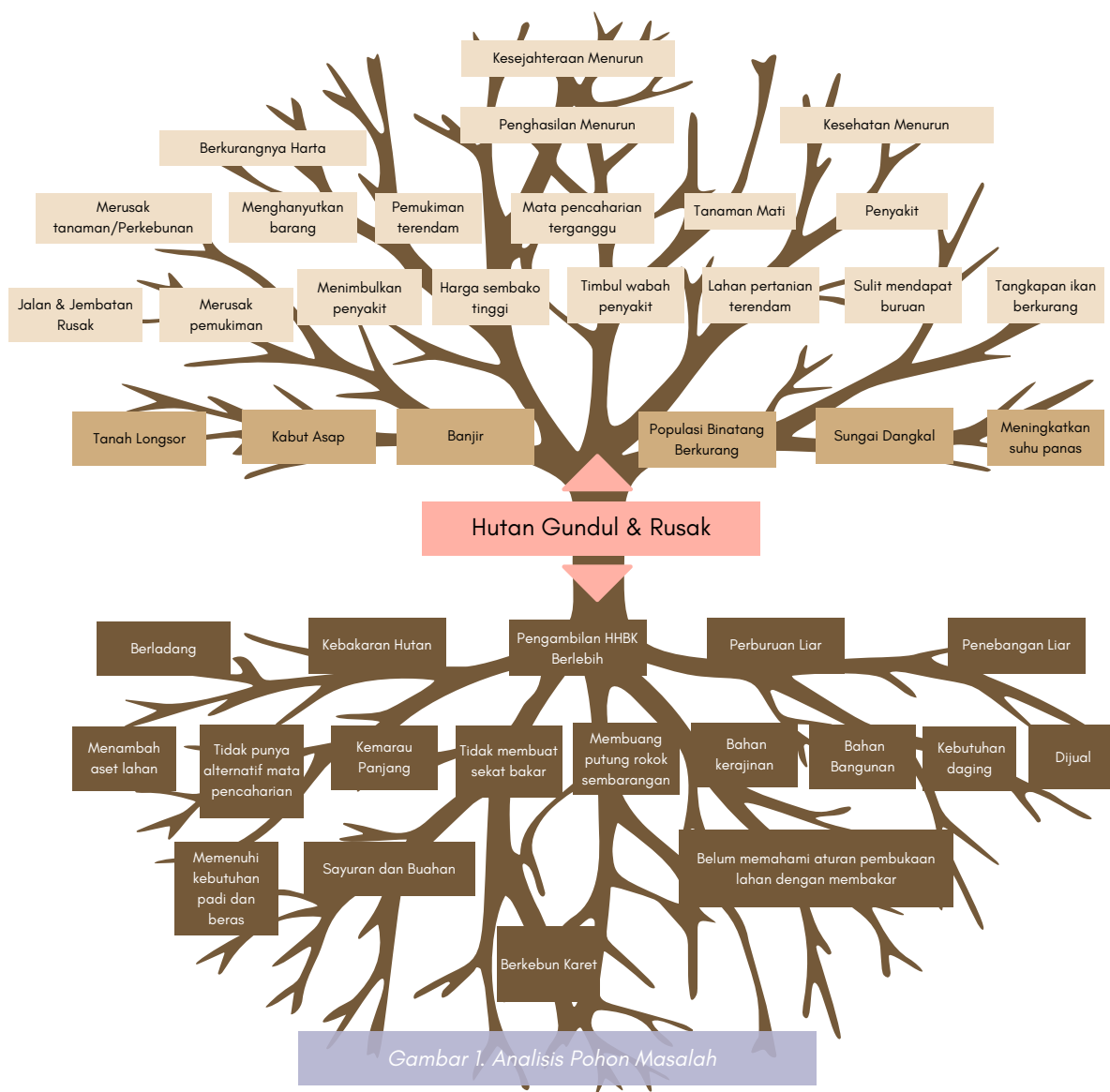
(Yayasan PRCF Indonesia/Zulkifli Hs)



## 1.2. ANALISIS POHON MASALAH DAN POHON SOLUSI

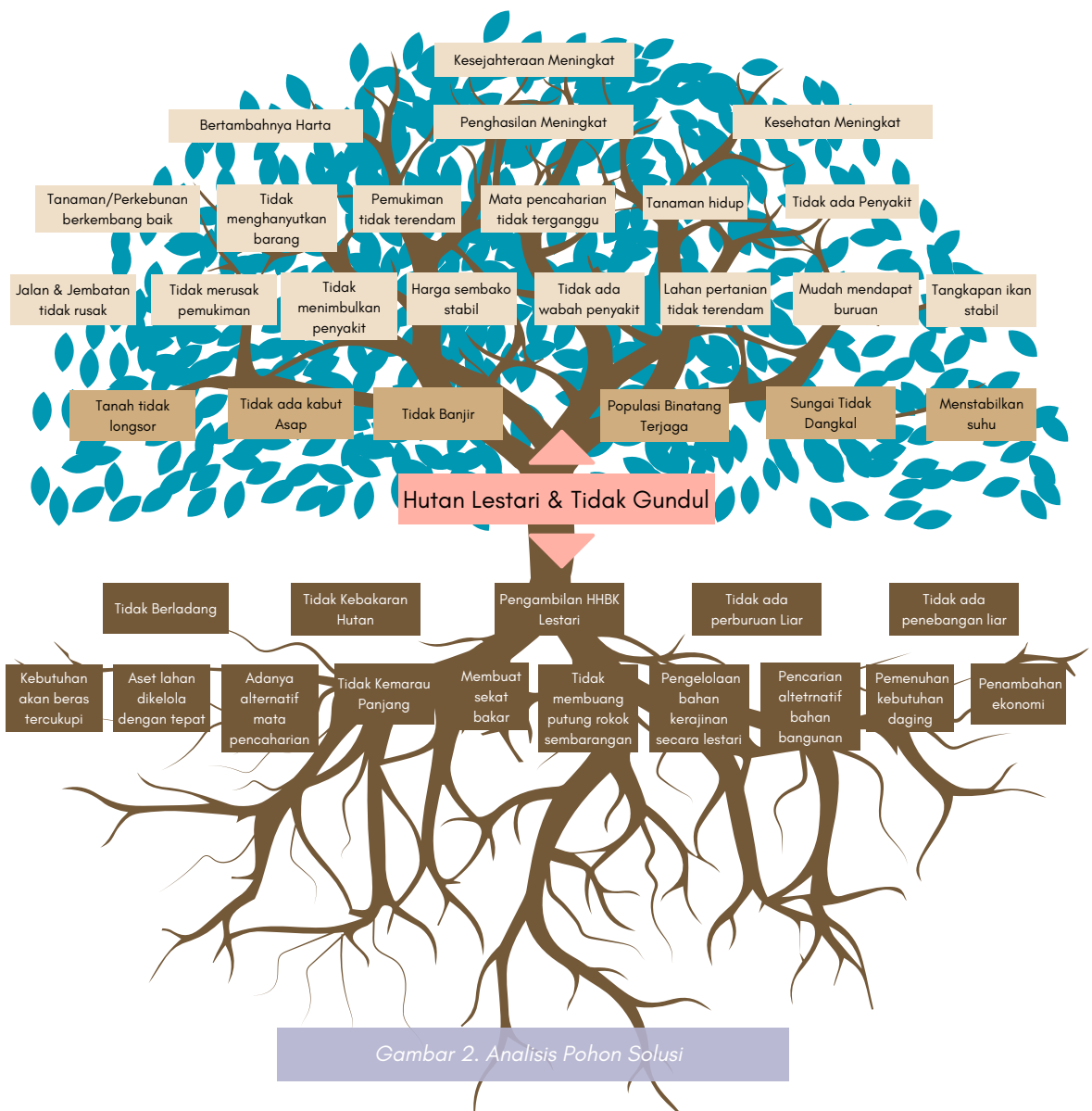
Analisis Pohon Masalah adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami akar penyebab dari suatu masalah serta dampak yang diakibatkannya. Dalam konteks pengelolaan Hutan Desa, analisis pohon masalah bisa dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama. Dari sini, kita dapat menelusuri akar penyebabnya, seperti penebangan liar atau membuka lahan dengan membakar.

Cabang-cabang dari pohon masalah ini akan menunjukkan berbagai dampak dari degradasi hutan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Setelahnya, analisis pohon solusi digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi “sebaliknya”. Misalnya, jika lahan tidak gundul, maka tidak akan terjadi banjir besar. Hal ini berkebalikan dengan Analisis Pohon Masalah.



Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan, kedua analisis ini sangat penting. Dengan demikian, objek yang digambarkan menjadi lebih jelas, berikut dengan “kondisi ideal” yang bisa dicapai jika berbagai upaya konservasi dilakukan. Tentu upaya itu tidak dapat terlepas dari perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap hutan, yang bisa dicapai melalui edukasi dan informasi yang tepat.

Secara keseluruhan, analisis pohon masalah dan pohon solusi memberikan gambaran tentang kondisi hubungan masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya gambaran seperti ini, akan lebih mudah bagi pendamping untuk menyusun kerangka kerja yang sistematis serta memahami, dan kemudian mengatasi masalah degradasi Hutan Desa yang ada.



Gambar 2. Analisis Pohon Solusi

## II. ANCAMAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN HUTAN DESA

Sebagai pengelola Hutan Desa, perjalanan yang dilalui oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tentu tidaklah mudah. Selama menjalankan program bersama dengan Yayasan PRCF Indonesia, LPHD menghadapi berbagai hambatan yang muncul di desa, antara lain penolakan masyarakat terutama terkait dengan kepemilikan lahan di dalam Hutan Desa.

Perubahan dalam tatanan lahan, area perhutanan, serta masalah deforestasi dan degradasi menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, masuknya ancaman seperti pemburu liar ke wilayah hutan turut mempengaruhi pengelolaan Hutan Desa. Dalam menghadapi kondisi ini, LPHD berusaha beradaptasi dan mencari solusi serta melibatkan masyarakat. Dengan komitmen dan upaya kolaboratif, LPHD berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada.

### 2.1. ANCAMAN

Ancaman sebagai penyebab-penyebab langsung yang teridentifikasi dalam analisis pohon masalah diperoleh dari forum kelompok diskusi bersama masyarakat desa. Penilaian ancaman dilakukan berdasarkan tiga aspek yang menggunakan empat kategori indikator penilaian sebagai penentu tingkat keparahan ancaman pada desa dengan rentang nilai tertentu.

Ancaman yang ditimbulkan akibat deforestasi dan degradasi hutan pada desa-desa dampingan dinilai berdasarkan beberapa kategori ancaman yang berbeda di setiap desanya. Tingkat ancaman yang ditimbulkan tergantung dari apa yang terjadi di masing-masing desa.

|                                                     | Sangat Tinggi /<br>Very High                                                           | Tinggi / High                                                                                 | Sedang / Medium                                                                     | Rendah / Low                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cakupan/Scope</b>                                | Kemungkinan akan mempengaruhi semua atau sebagian besar HD (71-100%)                   | Kemungkinan akan mempengaruhi sebagian besar HD (31-70%)                                      | Kemungkinan akan mempengaruhi sebagian HD (11-30%)                                  | Hanya cenderung mempengaruhi sebagian kecil dari HD (1-10%)                           |
| <b>Tingkat Keparahan / Saverity</b>                 | Kemungkinan besar menyebabkan deforestasi total di areal yang terkena dampak (71-100%) | Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan yang parah di daerah yang terkena dampak (31-70%)     | Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan sedang di area yang terkena dampak (11-30%) | Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan minimal di daerah yang terkena dampak (1-10%) |
| <b>Ketidakmampuan untuk balik / Irreversibility</b> | Efek tidak dapat dibalik atau butuh waktu (>100 tahun )                                | Efek tidak layak ( <i>not feasible</i> ) untuk dibalik atau akan memakan waktu (21-100 tahun) | Efek dapat dibalik dengan intervensi yang tepat atau butuh waktu (6-20 tahun)       | Efeknya mudah dibalik atau butuh waktu (0-5 tahun)                                    |

*Tabel 1. Indikator Tingkat Ancaman Akibat Deforestasi dan Degradasi*



### **2.1.1. DESA NANGA BETUNG**

Berdasarkan hasil diskusi, di Desa Nanga Betung terdapat 6 (enam) jenis ancaman yang kegiatannya dinilai dapat memberikan dampak pada desa, yakni:

1. Berladang di kawasan Hutan Desa
2. Penambangan emas dan bekas tambang emas
3. Pembukaan jalan untuk penambangan emas terbuka
4. Penambangan batu terbuka
5. Pemasangan jerat serta berburu untuk menangkap satwa
6. Penebangan pohon

Kegiatan seperti berladang, penambangan emas, pembukaan jalan untuk penambangan terbuka, dan penambangan batu terbuka, meskipun berdasarkan aspek cakupan termasuk dalam kategori ancaman dengan indikator rendah, namun tingkat keparahannya sangat signifikan.

### **2.1.2. DESA NANGA JEMAH**

Terdapat 5 (lima) ancaman yang dinilai pada Desa Nanga Jemah, yakni sebagai berikut:

1. Pembukaan Ladang
2. Penebangan Pohon
3. Perburuan
4. Mencari Ikan
5. Pengambilan Hasil Hutan/Tumbuhan Bukan Kayu.

Pembukaan ladang, penebangan pohon, berburu, mencari ikan, dan pengambilan hasil hutan bukan kayu tergolong sebagai ancaman dengan cakupan kategori rendah, karena aktivitas ini dilakukan di spot-spot tertentu dan tidak melampaui 10% dari total wilayah hutan.

Kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas ini membuat hutan gundul dan tanah rusak, sehingga pemulihan ekosistem hutan untuk bisa kembali ke kondisi semula membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun.

Di sisi lain, aktivitas pemasangan jerat dan perburuan satwa liar termasuk dalam kategori ancaman dengan indikator penilaian tinggi, baik dari aspek cakupan maupun tingkat keparahan. Satwa seperti trenggiling, kijang, rusa, kancil, landak, kelempiau, dan rangkong menghadapi ancaman hingga sekitar 70% akibat perburuan liar. Pemulihan populasi satwa-satwa tersebut ke kondisi semula sebelum perburuan memerlukan waktu lebih dari 100 tahun, menunjukkan betapa seriusnya dampak dari aktivitas perburuan tersebut terhadap keanekaragaman hayati hutan.

Tingkat keparahan dampak dari aktivitas ini juga termasuk kategori rendah, dengan estimasi kerusakan di bawah 5%. Perburuan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menginap di hutan untuk mencari kayu, dan penebangan pohon terjadi di sekitar lokasi tersebut.

Namun, pembukaan ladang yang melibatkan sifatnya penebangan hutan untuk membuka lahan memiliki dampak yang sangat tinggi. Aktivitas ini dapat menyebabkan kawasan hutan menjadi gundul, dan memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk mulai pulih. Bahkan, untuk mencapai pemulihan penuh hingga menjadi hutan utuh kembali, diperlukan waktu lebih dari 100 tahun.

### **2.1.3. DESA SRI WANGI**

Pada Desa Sri Wangi terdapat 3 (tiga) ancaman yang dinilai, yakni sebagai berikut:

1. Ladang berpindah
2. Penebangan pohon
3. Perburuan

Dari ketiga ancaman terhadap kelestarian hutan, perladangan berpindah menjadi ancaman utama dengan dampak yang paling parah. Meskipun cakupan aktivitas ladang berpindah, penebangan pohon, dan perburuan masih tergolong rendah, tingkat keparahan dan kemampuan pulih kembali dari lahan yang digunakan untuk perladangan berpindah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pembukaan ladang dengan menggunduli seluruh area hutan sangat memengaruhi kelestarian hutan, kecuali pada lahan yang mengandung pohon berharga seperti durian, tengkawang, dan tapang, yang sering dibiarkan utuh.

### **2.1.4. DESA TANJUNG**

Di Desa Tanjung, ada 7 (tujuh) ancaman yang dinilai yakni:

1. Penebangan pohon
2. Perburuan satwa
3. Penambangan emas dengan cara manual
4. Pemanfaatan kayu dan HHBK oleh orang luar Desa Tanjung
5. Ladang berpindah
6. Kebakaran hutan
7. Pembukaan jalan

Dari ancaman-ancaman tersebut hanya perburuan satwa saja yang cakupannya sangat tinggi karena dilakukan diseluruh Hutan Desa, sedangkan untuk ancaman lain masih dalam kategori rendah. Meski demikian, kegiatan penambangan emas, ladang berpindah, kebakaran hutan, pembukaan jalan antar Desa Tanjung dengan Desa Bahenap termasuk pada ting-

Penebangan pohon, terutama jenis seperti keladan, juga berdampak besar pada pemulihan hutan, membutuhkan waktu 30-50 tahun untuk pulih. Aktivitas penebangan ini biasanya untuk keperluan bahan bangunan, pembuatan perahu, dan kebutuhan lainnya, dan meski cakupannya tidak luas, dampaknya signifikan pada pohon-pohon tegakan yang ditebang.

Sementara itu, perburuan satwa memiliki dampak yang lebih rendah, terutama karena perburuan dengan jerat yang dilakukan oleh masyarakat bersifat sporadis dan lebih banyak ditujukan untuk berburu babi hutan. Perburuan terhadap rusa, kijang, dan pelanduk sangat jarang terjadi, sehingga dampaknya terhadap populasi satwa-satwa ini tidak terlalu besar, dan waktu pemulihannya relatif singkat, berkisar antara 1 hingga 3 tahun.

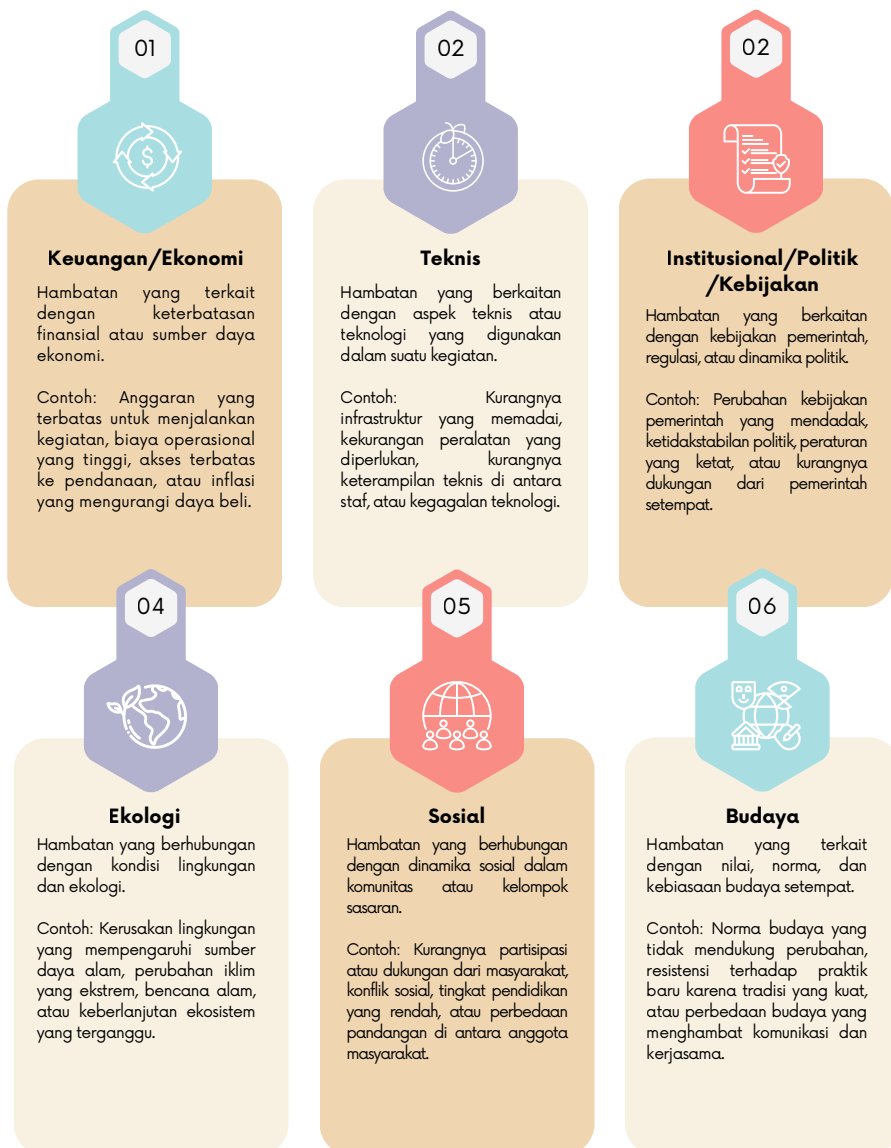
kat keparahan yang sangat tinggi hingga membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan penebangan pohon dan pemanfaatan HHK dan HHBK oleh orang luar Desa Tanjung masih tergolong rendah baik dalam cakupan areal maupun pada tingkat keparahannya.

Penebangan pohon di Desa Tanjung, yang dilakukan untuk keperluan seperti pembuatan rumah, perahu, dan jembatan, dianggap sebagai ancaman dengan cakupan kecil. Namun, jika aktivitas ini terus berlanjut dalam jangka waktu panjang, pemulihan hutan akan memerlukan waktu yang sangat lama, diperkirakan hingga 100 tahun untuk mencapai kondisi semula. Meskipun rendah, ancaman ini tetap signifikan karena proses pemulihan area yang terdampak tidak dapat berlangsung cepat dan tetap memerlukan perhatian lebih.

## 2.2. ANALISIS HAMBATAN

Analisis hambatan dilakukan dalam rangka membantu mendesain kegiatan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Analisis dilakukan dengan mendiskusikan hambatan apa yang menghalangi atau menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakannya alternatif-alternatif solusi yang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil Analisis Pohon Solusi.

Analisis hambatan akan sangat bermanfaat jika mempertimbangkan apa saja penyebab langsung dan tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan. Terdapat enam kategori tipe hambatan yang mungkin menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakannya alternatif solusi oleh masyarakat.



*Gambar 3. Tipe Hambatan dalam Pencegahan Deforestasi dan Degradasi*





(Yayasan PRCF Indonesia / @broorza AY)

Secara ringkas, setiap desa akan melakukan identifikasi apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi untuk selanjutnya mencari dan menentukan penanganan yang hendak dilakukan atas hambatan tersebut berdasarkan tipe dari hambatan yang ditemukan.

#### **2.2.1. DESA NANGA BETUNG**

Dari enam tipe hambatan yang ada, sektor perekonomian, pelaksanaan teknis di lapangan, kebijakan institusional, dan ekologi merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan hutan di Desa Nanga Betung.

Terbatasnya pengetahuan, wawasan, dan sumber daya keuangan masyarakat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas dan keterampilan yang tepat sasaran sangat dibutuhkan. Selain itu, fasilitasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan tersebut. Membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pembiayaan serta penerapan skema imbal jasa ekosistem dalam pengelolaan Hutan Desa juga dapat menjadi solusi yang efektif.

#### **2.2.2. DESA NANGA JEMAH**

Perekonomian dan aspek teknis menjadi hambatan utama di Desa Nanga Jemah, terutama keterbatasan biaya, modal, pengetahuan, dan wawasan. Untuk mengatasi hambatan ini, penting membangun komunikasi dan kemitraan guna mendukung pembiayaan kegiatan pengelolaan Hutan Desa.

Penanganan yang efektif mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dan LPHD, serta memfasilitasi kegiatan yang mendukung praktik lapangan dalam pengelolaan Hutan Desa dan usaha berkelanjutan. Dengan penanganan tersebut, diharapkan masyarakat Desa Nanga Jemah dapat mengelola Hutan Desa dengan lebih baik di masa mendatang.

### 2.2.3. DESA SRI WANGI

Sama halnya dengan desa lainnya, perekonomian merupakan isu mendasar di Desa Sri Wangi. Keterbatasan biaya, pengetahuan, wawasan, pemahaman, serta berbagai kegiatan lainnya menjadi hambatan dalam pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk membangun komunikasi dan kemitraan guna mendukung pembiayaan kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, pemodal usaha, serta fasilitas untuk kegiatan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat juga dapat diterapkan sebagai upaya untuk memperbaiki kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman di Desa Sri Wangi.



### 2.2.4. DESA TANJUNG

Di Desa Tanjung, akses ke lokasi desa menjadi hambatan tersendiri. Akses yang relatif sulit, dengan topografi berbukit, merupakan satu-satunya jalur yang dapat dilalui untuk mencapai Desa Tanjung. Selain itu, perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut juga menjadi tantangan.

Keterbatasan biaya untuk melaksanakan kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, serta modal dalam pengembangan usaha menjadi kendala yang signifikan. Selama ini, masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di dalam hutan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tanpa memperhatikan batas pengambilan yang berkelanjutan.

Beberapa tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan HHBK sering kali tidak berkelanjutan. Untuk mengalihkan fokus masyarakat dari kegiatan di dalam hutan, perlu melibatkan mereka dalam pelatihan, penyadartahuan, dan pengelolaan usaha produktif. Hal ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Selain itu, menjalin kemitraan dan membangun komunikasi juga penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

# III. PENYADARTAHUAN KONSERVASI HUTAN DESA

## 3.1. SOSIALISASI DAN PENYADARTAHUAN MASYARAKAT DESA DAMPINGAN

Sosialisasi program dan penyadartahuan masyarakat adalah elemen krusial karena memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan suatu program, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi aktif dan dukungan mereka.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengadopsi praktik yang diinginkan, berkontribusi secara efektif, dan merasa memiliki terhadap program tersebut.

Hal ini tidak hanya memperkuat keberhasilan jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang, karena masyarakat yang teredukasi cenderung lebih berkomitmen dalam menjaga dan meneruskan inisiatif yang bermanfaat bagi mereka dan lingkungan sekitarnya.

Sosialisasi maupun pelatihan menjadi alternatif yang bisa dilakukan untuk menyampaikan informasi secara langsung. Meskipun dilakukan secara bertahap, implementasi dari program-program yang dilakukan pada desa dampingan ini ke depannya bisa dapat terus dilakukan.

Pada pelaksanaan program Imbal Jasa Ekosistem melalui dukungan TFCA Kalimantan Siklus 5, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam hal pelestarian Hutan Desa. Kegiatan-kegiatan ini secara sederhana dirumuskan ke dalam tiga strategi yakni, *sosialisasi dan penyadartahuan secara langsung, pemanfaatan media, serta pelibatan aktif Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).*



Gambar 4. Pokok-Pokok Strategi Komunikasi dan Penyadartahuan terkait Konservasi Hutan Desa.

### 3.1.1. Kegiatan Sosialisasi dan Penyadartahuan secara Langsung

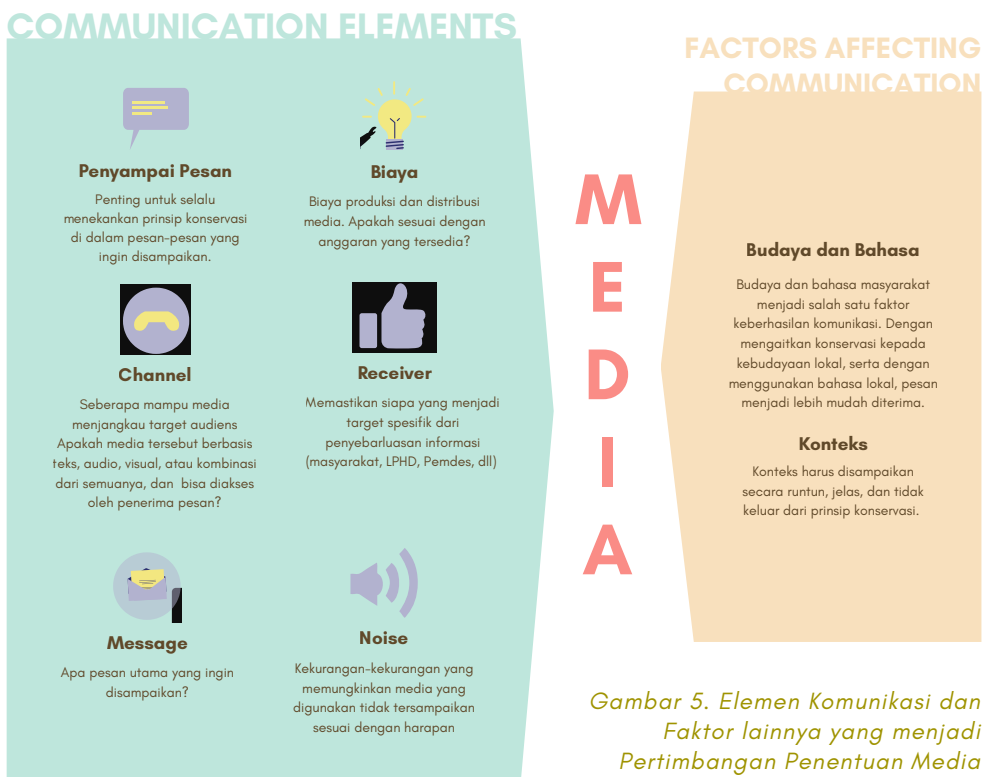
Sosialisasi dan penyadartahuan secara langsung dapat dilakukan selama ada interaksi tatap muka. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat umum dan diskusi kelompok. Beberapa rapat umum dan diskusi kelompok telah diadakan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan warga desa.

Selain menjelaskan pentingnya pelestarian hutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, forum ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi dan saran dari warga. Artinya, komunikasi yang dibangun bersifat aktif, bukan hanya satu arah. Proses komunikasi yang diterapkan tidak hanya bersifat *top-down* (dari atas ke

bawah), tetapi juga *bottom-up* (dari bawah ke atas). Dalam setiap kegiatan workshop atau pelatihan, sosialisasi dan penyadartahuan selalu disisipkan. Selain keterampilan teknis yang diajarkan kepada peserta atau masyarakat dalam hal menjaga hutan dan mengelola usaha, mereka juga diharapkan memahami bahwa prinsip dasar dari semua agenda kegiatan ini adalah pelestarian Hutan Desa.

Masyarakat peserta juga diharapkan dapat menjadi penyambung lidah dalam menyebarkan informasi kepada warga lainnya, terutama mengingat adanya budaya berkumpul, seperti dalam acara hajatan, arisan, dan pertemuan sosial lainnya.

### 3.1.2 Sosialisasi dan Penyadartahuan melalui Pemanfaatan Media



Gambar 5. Elemen Komunikasi dan Faktor lainnya yang menjadi Pertimbangan Penentuan Media Sosialisasi dan Penyadartahuan.



Pemilihan bentuk media yang tepat sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif, sehingga target sasaran dapat dicapai secara optimal. Penentuan media Yayasan PRCF Indonesia dapat berjalan secara efisien dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti elemen pokok komunikasi serta efektivitasnya. Dengan pertimbangan tersebut, konsep penyebaran dan pengemasan media menjadi lebih terarah dan strategis.

Berdasarkan pertimbangan ini, Yayasan PRCF Indonesia memutuskan untuk memproduksi:



| Media                                  | Materi                                                                                                                                                                          | Target                                                    | Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buku</b>                            | Berisi poin-poin substansi program, poin-poin aktivitas yang diuraikan dengan lebih terstruktur. Menggunakan bahasa Indonesia baku dan istilah-istilah konservasi atau Program. | Pemerintah, akademisi, stakeholder lain.                  | Buku lebih bersifat pada kajian terbatas, sehingga target yang dituju juga lebih spesifik. Melalui buku, kajian terhadap program menjadi lebih mendalam dan bisa menjadi modal untuk keberlanjutan program atau untuk pelaksanaan program lain. |
| <b>Film</b>                            | Berisi rangkuman kegiatan program, dilengkapi oleh wawancara yang melibatkan para pelaku program, termasuk masyarakat.                                                          | Pemerintah, akademisi, stakeholder lain, masyarakat umum. | Film lebih mudah dan umum diterima oleh masyarakat, namun tidak bisa terlalu intens menggali substansi program.<br><br>Melalui film, pengenalan substansi program bisa dilakukan dengan lebih masif.                                            |
| <b>Banner, Baliho, Spanduk, Flyer.</b> | Berisi imbauan, arahan, maupun sosialisasi tahap awal.                                                                                                                          | Masyarakat umum, pemerintah desa.                         | Media cetak bisa dilihat oleh masyarakat umum, mudah disebarluaskan, namun tidak mendalam dan tidak bertahan lama.<br><br>Melalui spanduk, himbauan, arahan, atau pemberitahuan penting bisa dilakukan dengan cepat dan massif.                 |
| <b>Media Sosial, Website</b>           | Berisi liputan kegiatan dan dokumentasi.                                                                                                                                        | Masyarakat umum.                                          | Media sosial atau website adalah media yang minim biaya dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas, namun di area yang minim sinyal, hal ini tidak efektif.                                                                                   |

*Tabel 2. Elemen Komunikasi yang menjadi Pertimbangan Penentuan Media Sosialisasi dan Penyadartahuan*

### 3.2. PENERAPAN DAN TINGKAT SERAPAN OLEH MASYARAKAT

Penerapan dan Tingkat Serapan oleh Masyarakat

- **Peningkatan Kesadaran:** Hasil dari berbagai kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan. Banyak warga yang sekarang lebih memahami peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan manfaat ekonominya.
- **Partisipasi Aktif:** Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian hutan meningkat. Misalnya, dukungan pemerintah desa, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat meningkat dari sebelum adanya program.
- **Perubahan Perilaku:** Beberapa perubahan perilaku positif mulai terlihat di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih sadar dan berhati-hati dalam beraktivitas di dalam Hutan Desa, serta dalam menggunakan sumber daya hutan dan menunjukkan minat yang lebih besar untuk terlibat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Contohnya, tidak sedikit masyarakat yang ingin terlibat di dalam kegiatan patroli Hutan Desa.

Melalui kombinasi strategi yang melibatkan berbagai metode komunikasi dan pendidikan, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan. Ke depan, diharapkan bahwa momentum ini akan terus berlanjut.



### 3.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari upaya sosialisasi dan penyadartahuan di desa-desa dampingan. Berikut rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari strategi komunikasi.

#### LANGKAH 01

##### Penguatan Infrastruktur Komunikasi

###### 1. Penguatan Infrastruktur Komunikasi

- Pembangunan Pusat Informasi Desa: Mendirikan pusat informasi di desa yang dilengkapi dengan materi edukasi tentang pelestarian hutan, teknologi pengelolaan hutan berkelanjutan, dan berbagai informasi terkait. Pusat ini dapat menjadi tempat berkumpulnya warga untuk berdiskusi dan belajar. Kantor LPHD atau LDPH bisa didorong sebagai pusat informasi.
- Pengembangan Sistem Informasi Digital: Membuat website atau aplikasi mobile yang memuat informasi, berita terbaru, dan kegiatan terkait Hutan Desa. Sistem ini dapat menjadi sarana komunikasi dua arah dan *data base*.

01

#### LANGKAH 02

##### Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Teknis Produksi Komunikasi

- Pelatihan Lanjutan untuk LPHD: Menyelenggarakan pelatihan lanjutan tentang membangun strategi komunikasi yang tepat sasaran sehingga pada akhirnya mereka juga dapat optimal melakukan kegiatan program dan penyebarluasan informasi di tingkat tapak.
- Program Mentor: Mengadakan program mentor di mana anggota LPHD yang telah terlatih menjadi mentor bagi warga lainnya, memperluas dampak pelatihan dan memastikan pengetahuan diterapkan dengan benar.

02

#### LANGKAH 03

##### Kampanye dan Kegiatan Berkelanjutan

- Kampanye Media Berkelanjutan: Kampanye melalui media sosial, audio-visual, atau media cetak. Penting untuk melibatkan tokoh lokal atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan daya tarik kampanye.
- Kegiatan Edukatif Rutin: Mengadakan kegiatan edukatif secara rutin seperti pameran lingkungan, lomba terkait pelestarian hutan, dan kegiatan lainnya yang bertema konservasi di lingkup desa.

03

04

05

06

LANGKAH 04

### Partisipasi dan Kolaborasi

- Peningkatan Partisipasi Anak Muda: Mengajak generasi muda untuk terlibat aktif melalui program *volunteer*, lomba inovasi terkait lingkungan, dan kegiatan *ekstrakurikuler* di sekolah yang berfokus pada pelestarian hutan.
- Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal: Bekerjasama dengan LSM, universitas, dan lembaga pemerintah untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, dan materi edukasi.

LANGKAH 05

### Pemantauan dan Evaluasi

- Sistem Pemantauan Berbasis Komunitas: Mengembangkan sistem monitoring yang melibatkan masyarakat dalam memproduksi media kampanye yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan konservasi.
- Evaluasi Berkala: Mengadakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi komunikasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Hasil evaluasi harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

LANGKAH 06

### Inisiatif yang Kreatif

- Pengembangan Kreativitas: Mendorong pengembangan kreativitas dalam hal kampanye, misalnya dengan media komik, lukisan, lagu-lagu, yang mudah diterima oleh masyarakat.
- Apresiasi terhadap seniman lokal: Seniman lokal dapat dilibatkan ke dalam kegiatan kampanye. Selain turut serta dalam menyosialisasikan program, hal ini juga bisa membantu pengembangan atau pelestarian kebudayaan lokal.

*Gambar 6. Ruang Lingkup Aktivitas yang Berpotensi menjadi Rencana Tindak Lanjut Sosialisasi dan Penyadartahuan.*



## IV. SISI PEMBELAJARAN DALAM SOSIALISASI DAN PENYADARTAHUAN

Sosialisasi program dan penyadartahuan masyarakat adalah elemen krusial karena memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan suatu program. Tujuan akhirnya meningkatkan partisipasi aktif dan dukungan mereka.

Pemahaman yang baik di masyarakat dapat mengadopsi praktik yang diinginkan, berkontribusi secara efektif dan merasa memiliki terhadap program tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat keberhasilan jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang, karena masyarakat yang teredukasi cenderung lebih berkomitmen dalam menjaga dan meneruskan inisiatif yang bermanfaat bagi mereka dan lingkungan sekitarnya.

Selama Yayasan PRCF Indonesia melaksanakan program Imbal Jasa Lingkungan dengan dukungan TFCA Kalimantan Siklus 5. Terdapat beberapa hal penting yang bisa menjadi pembelajaran ketika menyusun rencana kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan. Pembelajaran ini terkait dengan metode-metode pendekatan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bisa mengacu pada pendekatan-pendekatan di Gambar 7.

Pengimplementasian rekomendasi kegiatan dan pendekatan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta lingkungan di desa-desa dampingan.



*All photos: Dok. Yayasan PRCF Indonesia*



### **Pendekatan Partisipatif**

**Pelibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ini termasuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan ide dari masyarakat.

**Kolaborasi dengan Tokoh Lokal:** Mengajak tokoh adat, pemimpin komunitas, dan lembaga lokal untuk mendukung dan mempromosikan program.



### **Pendekatan Berbasis Bukti**

**Penelitian dan Data:** Menggunakan data dan penelitian ilmiah untuk merancang proyek yang berbasis bukti. Melakukan studi awal untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis setempat.

**Pemantauan dan Evaluasi:** Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.



### **Pendekatan Holistik**

**Integrasi Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan:** Merancang proyek yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Memastikan bahwa setiap intervensi memberikan manfaat multidimensi bagi masyarakat.

**Pendidikan dan Kesadaran:** Mengintegrasikan kegiatan pendidikan dan kesadaran dalam setiap tahap proyek untuk memastikan pemahaman dan dukungan masyarakat.



### **Pendekatan Inklusif**

**Kesetaraan Gender dan Inklusi:** Memastikan bahwa proyek mencakup partisipasi yang adil dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal.

**Akses dan Partisipasi:** Membuat mekanisme yang memudahkan akses dan partisipasi semua anggota masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan khusus.



### **Pendekatan Adaptif**

**Fleksibilitas dalam Pelaksanaan:** Mengembangkan rencana program yang fleksibel untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan.

**Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, seperti aplikasi monitoring, komunikasi digital, dan alat analisis data.

*Gambar 7. Tipe Pendekatan dalam Sosialisasi dan Penyadartahuan Masyarakat terkait Konservasi Hutan Desa.*

## V. PENUTUP: KESADARTAHUAN ADALAH KUNCI

---

Kegiatan penyadartahuan membantu masyarakat memahami pentingnya ekosistem serta jasa-jasa yang disediakan, seperti penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati. Pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat akan lebih mendukung dan terlibat aktif dalam program Imbal Jasa Ekosistem atau *Payment for Ecosystem Services* (PES).

Program penyadartahuan yang efektif dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam. Masyarakat yang sadar akan manfaat ekosistem cenderung mengurangi aktivitas ilegal, seperti penebangan liar, dan mulai beralih ke praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Selain itu, masyarakat yang menyadari manfaat langsung dan tidak langsung dari ekosistem akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan. Partisipasi aktif ini sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang perlindungan kawasan Hutan Desa.

Dukungan dari masyarakat lokal adalah kunci keberlanjutan program PES. Penyadartahuan yang efektif memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami dan mendukung, tetapi juga terus berpartisipasi dalam program, bahkan setelah insentif awal dari PES berakhir.

Implementasi kegiatan penyadartahuan yang mencakup pelatihan dan pendidikan secara tersurat dalam setiap agenda program agar tercapainya tujuan tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyadartahuan, antara lain adalah memahami konteks lokal melalui penilaian kebutuhan, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap hutan dan jasa ekosistem, serta memahami konteks budaya.

Materi komunikasi dan bentuk media juga harus disesuaikan, mempertimbangkan bahasa dan media yang lazim digunakan oleh masyarakat, seperti radio komunitas atau video. Konten yang diproduksi harus relevan dan dekat dengan kondisi masyarakat.

Penggunaan teknologi saat ini juga dapat menunjang kegiatan penyadartahuan. Saat ini, tidak sedikit masyarakat desa yang sudah menggunakan ponsel dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya Tim Patroli Hutan Desa sudah melakukan pendataan biodiversitas menggunakan aplikasi khusus. Penggunaan teknologi ini tentunya bisa memperkuat kegiatan penyadartahuan. Oleh karena itu, Yayasan PRCF Indonesia juga memproduksi film setelah menilai bahwa media audio-visual sangat diminati oleh masyarakat.

Poin penting dari semua ini adalah kolaborasi antarpihak. LPHD, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat merupakan juru bicara yang efektif dalam menyebarkan informasi, sekaligus menjadi pelaku yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Partisipasi mereka secara luas turut mendorong keberhasilan program PES itu sendiri.\*\*\*





(Yayasan PRCF Indonesia/Abroorza AY)



(Yayasan PRCF Indonesia/Andika Purnama)



(Yayasan PRCF Indonesia/Andika Purnama)



(Yayasan PRCF Indonesia/Abroorza AY)



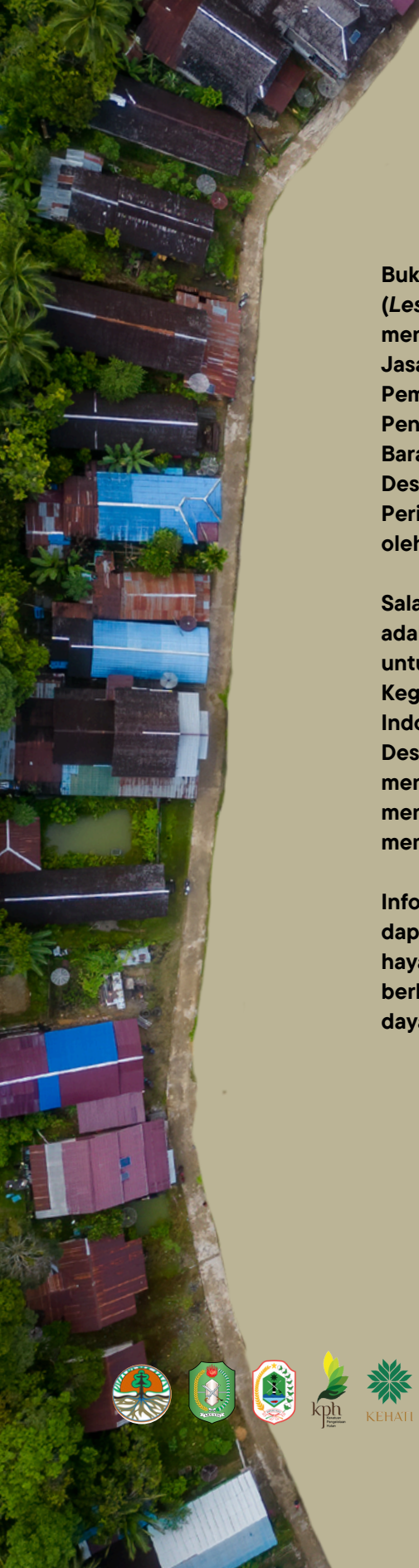
(Yayasan PRCF Indonesia/Andika Purnama)



(Yayasan PRCF Indonesia/Andika Purnama)







Buku ini merupakan rangkuman hasil pembelajaran (*Lesson Learned*) dari Yayasan PRCF Indonesia dalam menjalankan Pengembangan Inisiatif Pendanaan Imbal Jasa Ekosistem untuk Mendukung Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Program ini dilaksanakan di Desa Nanga Betung, Desa Nanga Jemah, Desa Sri Wangi, dan Desa Tanjung, Periode April 2021 hingga Maret 2024 dan didukung oleh Yayasan Kehati - TFCA Kalimantan Siklus 5.

Salah satu aspek yang menjadi fokus program ini adalah pengembangan kelembagaan yang bertujuan untuk mengimplementasikan Imbal Jasa Ekosistem. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan PRCF Indonesia bersama dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di keempat desa ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa dan menciptakan alternatif ekonomi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kelestarian lingkungan.

Informasi yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat mendukung perlindungan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dengan dukungan dari berbagai pihak, sehingga kelestarian alam dan sumber daya yang ada dapat terus terjaga.

